

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI DESA
TERATAK BULUH KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN
KAMPAR**



DISUSUN OLEH :

SITI FATIMAH YULIS

10975005806

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN E-KTP DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

OLEH:
SITI FATIMAH YULIS

Penelitian ini mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di desa Teratak Buluh kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang berlangsung pada bulan Mei 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara random sampling atau secara acak dan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar yaitu: Pertama Tingkat Pendidikan. berdasarkan penelitian tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP yaitu dengan Persentase 54,43%, Kedua Tingkat pendapatan, berdasarkan penelitian tingkat pendapatan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP yaitu dengan Persentase 51,75%, ketiga Jarak, jarak tempat tinggal dengan pererkaman data mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP dengan pesentase 54,85%, keempat segi sikap dimana berdasarkan penelitian masyarakat merasa terganggu aktifitasnya sehingga mengantri dari pagi sampai sore sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP dengan persentase 27,87% dan dari segi penyuluhan, berdasarkan penelitian penyuluhan yang diberikan oleh pemerintahan Desa ke masyarakat belum bisa dimengerti karna pemerintahan Desa hanya mensosialisasikan secara global melalui pengumuman dimesjid.jadi kelima faktor tadi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, hanya dia yang dapat memberikan arrahman dan arrahmim kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, dengan judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DIDESA TERATAKA BULUH KECAMTAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR.

Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar kita Muhammad SAW, dimana beliau adalah seorang pemimpin yang ulung dan sebagai panutan umatnya dalam menjalankan aktivitas kehidupan, semoga kita selalu mengikuti langkahnya dan selalu bersolawat kepadanya, amin...

1. Ayahanda (Izar) dan Ibunda tercinta (Animar) berserta seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi baik secara material dan moral sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Nazir Karim,MA. Sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU pekanbaru.
3. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU DR. Mahendra Romus, SP M.E, beserta pembantu dekan, Ketua Jurusan Komunikasi, seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

4. Drs. Almasri, M.Si selaku pembimbing, serta Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis dalam mewujudkan skripsi ini.
5. Izani Fitra yang merupakan Kakak kandung yang telah memberikan motivasi baik secara material dan moral sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Irvan Zaiza, Ariya Riska Alni, Anggi Utami, Fitra Herlinda, Endah Setiorini dan Atika Hari Riya yang merupakan sahabat – sahabat ku tercinta yang telah memberikan motivasi baik secara material dan moral sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Desa Teratak Buluh yaitu bapak Yuniwir serta masyarakat yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk memperoleh data – data dalam penelitian ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat.

Atas segala peran dan partisipasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih mudah – mudahan Allah memberikan karunia-Nya yang setimpal dan dibalas yang berlipat ganda, amin...

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Partisipasi	9
2.2 Masyarakat	22
2.3 Teori Administrasi Kependudukan dalam UU No.23 Tahun 2006.....	24
2.4 Surat Edaran Mendagri Mengnai E-KTP	31
2.5 Defenisi Konsep	36
2.6 Konsep Operasional.....	37
2.7 Teknik Pengukuran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.2 Jenis Penelitian	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	42
3.5 Populasi dan Sampel.....	43
3.6 Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Gambaran Umum Desa Teratak Buluh	46
4.2 Sosial Budaya Masyarakat Desa Teratak Buluh.....	48
4.3 Jumlah Masyarakat Desa Teratak Buluh Berdasarkan Jenis Kelamin	49
4.4 Jumlah Masyarakat Desa Teratak Buluh Berdasarkan Tingkat Umur	49
4.5 Mata pencarian	50
4.6 Pendidikan	51
4.7 Agama Penduduk.....	53
4.8 Pemerintahan	53

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	59
5.1 Identitas Responden Penelitian.....	59
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	59
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	61
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan pekerjaan.....	61
5.2 Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-Ktp Di Desa Teratak Buluh.....	62
5.2.1 Tingkat Pendidikan	62
5.2.2 Tingkat Pendapatan.....	66
5.2.3 Jarak Tempat Tinggal.....	70
5.2.4 Sikap.....	74
5.2.5 Penyuluhan yang Diberikan	77
5.3 Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Indikator Penelitian.....	81
5.3.1 Tingkat Pendidikan	82
5.3.2 Tingkat Pendapatan.....	83
5.3.3 Jarak Tempat Tinggal.....	84
5.3.4 Sikap.....	85
5.3.5 Penyuluhan.....	86
 BAB VI KESIMPULAN.....	 88
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perekaman Data E-KTP Desa Teratak Buluh.....	5
Tabel III.1	Populasi dan Sampel	41
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel IV.2	Jumlah Masyarakat Desa Teratak Buluh Berdasarkan Umur .	46
Tabel IV.3	Mata Pencarian Penduduk Desa Teratak Buluh	47
Tabel IV. 4	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tertak Buluh	48
Tabel IV.5	Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Tertak Buluh.....	49
Tabel IV.6	Agama Penduduk	50
Tabel IV.7	Nama-Nama Kepala Desa.....	51
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	56
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel V.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Tabel V.4	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Tabel V.5	Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP	60
Tabel V.6	Tanggapan Responden Menegnai Faktor Pendidikan Mempengaruhi Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Mengikuti Prosedur Pembuatan E-KTP	61
Tabel V.7	Tanggapan Responden Mengenai Setiap Warga yang Wajib KTP Harus Memiliki E-Ktp Sebagai Identitas Diri.....	61
Tabel V.8	Tanggapan Responden Mengenai Bahwa Pengetahuan Tentang E-KTP Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP	62
Tabel V.9	Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Buta Huruf dan Tidak Bias Baca Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	63

Tabel V.10	Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pendapatan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP	64
Tabel V.11	Tanggapan Responden Mengenai Jenis Pekerjaan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP	65
Tabel V.12	Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Harus Meninggalkan Pekerjaan untuk Berpartisipasi Dalam Pembuatan E-KTP	65
Tabel V.13	Tanggapan Responden Mengenai Jika Meninggalkan Pekerjaan Maka Tidak Dapat Uang untuk Makan.....	66
Tabel V.14	Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Pengangguran Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP	67
Tabel V.15	Tanggapan Responden Mengenai Jarak Tempat Tinggal dengan Kantor Camat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP	68
Tabel V.16	Tanggapan Responden Mengenai Kekantor Camat Harus Menggunakan Transportasi Dalam Pembuatan E-KTP.....	68
Tabel V.17	Tanggapan Responden Mengenai Jarak Tempat Tinggal Dapat Mempengaruhi Minat Dalam Pembuatan E-KTP	69
Tabel V.18	Tanggapan Responden Mengenai Jika Tidak Punya Kendaraan Tidak Bisa Kekantor Camat Dalam Perekaman Data Untuk E-KTP	69
Tabel V.19	Tanggapan Responden Mengenai Warga yang Asli Daerah yang Berada Diluar Daerah Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP.....	70
Tabel V.20	Tanggapan Responden Mengenai Perubahan KTP Menjadi E-KTP Merupakan Hal Yang Efektif	71
Tabel V.21	Tanggapan Responden Mengenai Apa Masyarakat Setuju Bahwa KTP Lama Diganti Dengan E-KTP.....	71
Tabel V.22	Tanggapan Responden Mengenai Dalam Pembuatan E-KTP Dapat Mempermudah Urusan.....	72

Tabel V.23	Tanggapan Responden Mengenai Dalam Pembuatan E-KTP Ini Sangat Mengganggu Aktifitas Dalam Pekerjaan Sehari-Hari	73
Tabel V.24	Tanggapan Responden Mengenai Dalam Pembuatan E-KTP Tidak Bisa Diwakilkan	73
Tabel V.25	Tanggapan Responden Mengenai Dalam Pembuatan E-KTP Pemerintahan Desa Harus Mensosialisakan Program Ini Kepada Masyarakat	74
Tabel V.26	Tanggapan Responden Mengenai Dalam Mensosialisaikan Pemerintah Desa Sudah Dapat Dimengerti	75
Tabel V.27	Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi yang Diberikan Membuat Masyarakat Termotivasi	75
Tabel V.28	Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Pemerintahan Desa yang Diberikan Sudah Keseluruh Masyarakat Desa Teratak Buluh	76
Tabel V.29	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Pendidikan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh	79
Tabel V.30	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Pendapatan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh	80
Tabel V.31	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Jarak Tempat Tinggal Antara Desa Teratak Bulu dengan Kecamatan Siak Hulu	81
Tabel V.32	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Sikap Masyarakat Mempengaruhui Partisipasi Masyarakat Pembuatan E-KTP	82
Tabel V.33	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Penyuluhan yang Diberikan Oleh Pemdes Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa dan negara yang sedang dalam tahap memantangkan dan penghayatan sistem demokrasi, partisipasi keterlibatan rakyat merupakan suatu yang cukup signifikan. Dalam sistem demokrasi, keberadaan rakyat sebagai subjek merupakan prasyarat yang tak terhindar.

Semangkin tinggi tingkat keterlibatan rakyat sebagai subyek dari sistem demokrasi, pada akhirnya menunjukkan tingkat kepercayaan sekaligus kepuasan mereka terhadap penyelenggaraan layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, demi menjaga berlangsungnya proses demokratisasi, dibutuhkan pengawasan yang secara langsung menempatkan rakyat sebagai subjek.

Tingkat pemahaman rakyat terhadap demokrasi, salah satunya diwujudkan dalam keterlibatan (partisipasi) mereka. Untuk mewujudkan bagian dari layanan publik tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat untuk juga dapat mentaati aturan-aturan yang telah digariskan oleh pelaksana pembangunan yaitu Pemerintah dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

E-KTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. E-KTP merupakan program pemerintah untuk mengganti KTP yang berlaku sekarang, yang mana dalam E-KTP terkandung chip dengan data sidik jari, tanda tangan, pasfoto, serta nomor induk kependudukan (NIK).

Landasan hukum pembuatan E-KTP (UU No.23/2006 tentang administrasi kependudukan dan UU No.35/2010 tentang cara dan teknik pembuatan E-KTP. E-KTP memiliki umur teknis 10 tahun. Masing masing penduduk hanya memiliki satu nomor induk kependudukan (NIK). Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa E-KTP ini anti cloning dan tidak dapat dipalsukan.

Dasar hukum pelaksanaan E-KTP adalah UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. UU Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan dan pembangunan keluarga, PP Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006.

Tujuan penerapan KTP yang dilengkapi biometrik dan Chip E-KTP yang berbasis NIK ini untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan, memberikan perlindungan status hak sipil setiap penduduk serta bentuk pengakuan negara bagi setiap penduduk.

Selain adanya tujuan penerapan E-KTP juga ada manfaat E-KTP antar lain sebagai identitas jati diri.data dalam E-KTP benar-benar menunjukkan identitas diri pemegangnya, selain itu mencegah terjadinya pemalsuan dokumen serta mempunyai pengaman data yang dapat diandalkan.

Proses pembuatan E- KTP (Secara Umum)

- a) Ambil nomor antrean
- b) Tunggu pemanggilan nomor antrean
- c) Menuju ke loket yang ditentukan
- d) Entry data dan foto
- e) Pembuatan KTP selesai(www.e-ktp.com)

Syarat pengurusan :

- a. Berusia 17 tahun atau lebih.
- b. Menunjukkan surat pengantar.
- c. Mengisi formulir F.1.
- d. Foto Kopi KK.

Cara membuat e-KTP diantaranya adalah:

1. Membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar dari RT/RW Kemudian ambillah nomor antrian di loket yang telah disediakan, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan dan membawa Surat Panggilan untuk membuat e-KTP dari Pemerintah Setempat.
2. Petugas akan meng-entri data dan foto secara digital. Bila sebelumnya telah pernah memiliki KTP, maka akan dilakukan verifikasi data kependudukan dengan database dan akan dipastikan bahwa hanya akan memiliki data tunggal. Bila belum pernah membuat KTP, maka anda akan mengisi formulir F1.
3. Membubuhkan tanda tangan di alat perekam tanda tangan. Pastikan bahwa yang dibubuhkan adalah tanda tangan yang asli dan tidak berubah-ubah, karena hal ini justru akan menyulitkan di kemudian hari bila ternyata tanda tangan tidak sama dengan dokumen yang lain, misalnya paspor, SIM, dll.
4. Sidik jari akan direkam di alat perekam sidik jari.
5. Dilakukan scan atau pemindaian retina mata pada alat pemindai retina yang telah disediakan.

6. Proses pembuatan e-KTP telah selesai. Selanjutnya, Surat Panggilan akan ditandatangani dan distempel resmi oleh petugas yang berwenang.

Desa Teratak Buluh merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Siak Hulu, Pada era kolonialis Belanda Teratak Buluh di perintah oleh Tengku Kocik (Adik Maruhun Nan Sakti lain Ibu). Kolonial Belanda memberlakukan "Pajak Jiwa", yang tidak dapat diterimanya hingga Tengku Kocik beserta, Teng Ku Nung, Tengku Ujang beserta Datuk Sinaro (Solim), Datuk Marajo (Rahman), Datuk Juanso (Tengku Nayan), dan Datuk Gadang mencari perlindungan ke Kerajaan Siak Sri Indra Pura.

Perkembangan penduduk dan pembangunan hingga terlaksana kegiatan beberapa kali pemekaran desa, Desa Pantai Raja, Desa Lubuk Siam, Desa Kampung Pinang dan terakhir tahun 2003 pemekaran Dusun 3 menjadi Desa Kubang Jaya. Jumlah penduduk desa Teratak Buluh adalah 4372 orang yang terdiri dari 3242 orang wajib KTP. Dari 3242 ini terdiri dari 34 dusun. Dari 3242 orang ini banyak yang tidak datang dalam perekaman data dalam pembuatan E-KTP yang berakhir pada tanggal 31 April 2012.

Tabel 1.1 Perekaman Data E-KTP Desa Teratak Buluh

No	NAMA DUSUN	WAJIB KTP	DATA E- KTP	PERSENTA SE
1	Dusun I Pasar Teratak Buluh RT 01 RW 01	106	63	3,37
2	Dusun I Pasar Teratak Buluh RT 01 RW 02	90	51	2,72
3	Dusun I Pasar Teratak Buluh RT 02 RW 02	87	43	2,30
4	Dusun I Pasar Teratak Buluh RT 01 RW 03	90	77	4,11
5	Dusun I Pasar Teratak Buluh RT 02 RW 03	81	50	2,67
6	Dusun II Pasar Teratak Buluh RT 01 RW 04	109	60	3,21
7	Dusun II Koto Indah RT 01 RW 05	86	54	2,88
8	Dusun III Koto Indah RT 02 RW 06	109	54	2,88
9	Dusun II Koto Indah RT 01 RW 07	88	51	2,72
10	Dusun II Kampung Petas RT 01 RW 08	98	57	3,04
11	Pasar Teratak Buluh RT 02 RW 01	108	47	2,51
12	Pasar Teratak Buluh RT 03 RW 01	72	41	2,19
13	Pasar Teratak Buluh RT 01 RW 02	84	53	2,83
14	Pasar Teratak Buluh RT 02 RW 02	107	62	3,31
15	Terusan Keramat RT 01 RW 02	107	65	3,47
16	Terusan Keramat RT 02 RW 02	86	54	2,88
17	Terusan Keramat RT 03 RW 02	84	33	1,76
18	Terusan Kocik RT 01 RW 02	104	71	3,79
19	Terusan Kocik RT 01 RW 03	72	35	1,87
20	Terusan Kocik RT 02 RW 03	98	72	3,84
21	Terusan Kocik RT 03 RW 03	89	48	2,56
22	Koto Tengah RT 01 RW 05	89	47	2,51
23	Koto Teratak Buluh RT 02 RW 05	98	67	3,58
24	Koto Tengah RT 02 RW 05	83	50	2,67
25	KP Koto Teratak Buluh RT 02 RW 05	127	59	3,15
26	Koto Tengah RT 03 RW 05	97	63	3,36
27	Telanai Indah RT 01 RW 06	80	60	3,21
28	Telanai Indah RT 02 RW 06	109	35	1,87
29	Telanai Indah RT 01 RW 07	78	63	3,37
30	Kampung Petas RT 01 RW 08	122	58	3,10
31	Koto Indah RT 01 RW 04	102	49	2,62
32	Lubuk Siam Teratak Buluh RT 01 RW 04	87	74	3,95
33	Koto Indah No 97 RT 01 RW 04	118	38	2,03
34	Koto Indah RT 02 RW 04	97	68	3,63
J U M L A H		3242	1872	100

Sumber : Kantor Camat Siak Hulu

Berdasarkan tabel diatas bahwa bisa disimpulkan dari 34 dusun yang ada di Teratak Buluh bahwa yang paling banyak dalam mengikuti untuk perekaman data E-KTP adalah pada Dusun I Pasar Teratak Buluh Rt 01 Rw 03 yaitu itu

mencapai jumlah 77 orang masyarakat ikut dalam perekaman data dengan persentase 4,1 %. Dan yang paling sedikit dalam mengikuti perekaman data E-KTP adalah pada Dusun Terusan Keramat Rt 03 Rw 02 yaitu mencapai jumlah 33 orang masyarakat ikut dalam perekaman data dengan persentase 1,7 %. Dilihat dari jumlah masyarakat yang wajib membuat E-KTP dengan jumlah 3242 orang, sedangkan masyarakat yang ikut serta dalam perekaman data E-KTP hanya mencapai 1872 orang Dengan persentase 58%. Artinya hanya separoh dari masyarakat yang wajib KTP di Desa Teratak Buluh kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan wajib KTP berjumlah 3242 orang yang wajib KTP.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Pengamatan yang penulis lakukan pada Kantor Camat Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar secara umum masih terlihat atau ditemui gejala – gejala antara lain: masih banyak masyarakat Teratak Buluh yang tidak datang dalam pembuatan E-KTP yang mana permasalahan ini terlihat berdasarkan perekaman data di Kantor Camat Siak Hulu. Berdasarkan gejala – gejala diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang selanjutnya akan diteliti yaitu : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam Penelitian ini adalah : untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori teori yang sudah diperoleh.
- b. Sebagai informasi bagi pemerintah Desa Terataka Buluh dalam berpartisipasi lebih ditingkatkan lagi bagi masyarakat desa Teratak Buluh.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap skripsi ini, maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulisan akan mengemukakan teori yang melandasi pembahasan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian, hipotesa, dan variable penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB V : GAMBARAN UMUM DESA TERATAK BULUH

Pada bab ini penulis akan membahas tentang sejarah singkat Teratak Buluh, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta jumlah masyarakat.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengemukakan hasil dari penelitian dan analisi dari penelitian yang dilakukan

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Dr. Made Pidarta, Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyongkong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya (Irene, Siti 2011 :50).

Menurut Kamus Besar Indonesia, kata ‘partisipasi’ artinya turut berperan serta dalam sebuah kegiatan (Setyoningtyas, Emilia 2003 : 330).

Kata partisipasi dari etomologi adalah merupakan padanan kata *participation* (bahas inggris) yang berarti bagian atau ikut serta. Menurut Alex (2005 : 478) partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti partisipasi atau peran serta ; keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan bersama-sama dengan orang-orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Partisipasi adalah sebuah kosa kata yang sudah lama menghihiasi bibir para pejabat dan lembaran-lembaran kebijakan pembangunan diindonesia (Triputro, R. Widodo. 2005: 95).

Sumarto (2003:17) berpendapat partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses

perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1985: 345) partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil

Pembangunan yang dirancang, diselenggarakan, dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan: “bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya”. (Kaho, Riwo, Josef 1988 : 111).

Ramlan Subakti (1999: 140) menjelaskan partisipasi adalah keikutsertaan warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi menurut Huneryear dan Hecman adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorong member sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka (Irene, Siti 2011: 51).

Menurut Handari Namawi (2004: 171), partisipasi anggota kelompok dapat dibedakan antara partisipasi fisik dan partisipasi non fisik, partisipasi fisik berupa tenaga kerja dan non fisik berupa pemberian pendapat.

Menurut Mubyarto (2000: 28), partisipasi masyarakat adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Ada tiga tradisi konsep partisipasi bila berkaitan dengan praktis pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial dan partisipasi warga.

a. Partisipasi politik

Partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan proses politik yang demikratik, yang melibatkan interaksi perseorangan dan organisasi. Partisipasi politik dihubungkan dengan demokrasi politik yang mengedepankan prinsip perwakilan dan partisipasi tidak langsung.

b. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial lebih berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. Partisipasi ini ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang terkait dengan proses pembangunan dalam konsultasi data dan pengambilan keputusan pada semua tahapan siklus proyek pembangunan, dari evaluasi sampai penilaian, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.

c. Partisipasi warga

Partisipasi warga menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Konsep dan asumsi dasar partisipasi masyarakat menurut (Irene, Siti 2011: 54) yaitu:

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik dilembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang incidental.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrument yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good dovernence).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah (Irene, Siti 2011:55).

Ada beberapa jenis partisipasi menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1985:349) yaitu :

- a. Partisipasi Buah Fikiran, yang diberikan partisipasi dalam pertemuan dalam rapat.

- b. Partisipasi Tenaga, yang diberikan partisipasi dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pemnagunan desa, partolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. Partisipasi Harta Benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa. Pertolongan bagi orang lain atau sebagainya.
- d. Partisipasi Keterlampilan dan Kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry.
- e. Partisipasi Sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, minalnya turut arisan, koperasi, layad, kondangan.

Ada beberapa bentuk partisipasi menurut Efendi, partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk yaitu: terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi Horiozontal. Disebut Partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai satatus bawahan, pengikut atau klien. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan. Adapun partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam

melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri Partisipasi masyarakat semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri (Irene, Siti 2011: 58).

Faktor yang menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat menurut (Irene, Siti 2011: 57) yaitu :

- a. Sifat malas, apati, masa bodoh dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
- b. Aspek-aspek tipologis (pembuktian dan jurang)
- c. Aspek ini Membahas hal-hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka buminya, luas area dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu.
- d. Geografis (pulau-pulau kecil yang terbesar letaknya)
- e. Demografis (jumlah Penduduk)
- f. Ekonomi (desa miskin/ tertinggal)

Ada faktor – faktor yang mempengaruhi dengan partisipasi masyarakat menurut Panggabean dalam Muhamad Al Amin (2003: 15) yaitu:

- a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan mempunyai banyak defenisi sepanjang waktu dan sepanjang banyak orang, menurut Brown : pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar di mana perubahan-perubahan di dalam tingkah laku dihasilkan didalam diri orang itu melalui didalam kelompok. Dari pandngan ini pendidikan adalah suatu proses yang mulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup (Ahmadi, Abu, 1991: 74). Perubahan pendidikan dapat terjadi karena adanya tenaga pendorong dari masyarakat sendiri, tetapi dapat juga diluar seperti karena adanya pengaruh kebudayaan asing yang bersifat positif (Ishaq, Isjoni. 2002: 89).Pendidikan dikatakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya.

b. Tingkat pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja, usaha, dan sebagainya atau pencarian(Sugono, denny dkk.2003: 69). Di dalam status sosial, peran uang atau harta sangat dominan, keterjangkauan dapat dipengaruhi oleh bentuk fasilitas sebagai pendukung yang penting didalam gerak sehari hari. Suatu penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomiannya.

c. Jarak Tempat Tinggal

Jika antara tempat yang akan dituju dengan tempat dimana seseorang bertempat tinggal, relatif dapat menentukan minat dan motivasi seseorang untuk mencapainya. Semakin dekat tempat tujuan dari tempat tinggalnya, semakin gampang dan mudah untuk dicapai atau dijangkau dan akan semangkin tidak merepotkan.

d. Sikap

Sikap merupakan perilaku. “perilaku” ialah tingkat atau perbuatan yang berkaitan dengan tanggapan seseorang terhadap lingkungannya (Sugono, denny dkk.2003: 354).

e. Penyuluhan yang diberikan

Penyuluhan adalah memberikan penerangan. Memberikan penerangan dalam hal ini berupa usaha untuk memberikan penjelasan dan kejelasan dari seseorang pribadi atau kelompok terhadap masyarakat umum.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan perwujudan dari kerikatan dan kesepakatan bangsa terhadap nilai-nilai demokrasi dan etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan (Ishak , 2010: 40).

Menurut pasaribu dan simanjuntak (1985:345) elemen masyarakat memang merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam program-program yang menyangkut penerimaan dan keterlibatan manusia, atau orang banyak. Elemen masyarak ini dapat bercorak fasif, yaitu orang tidak menolak suatu program pembangunan, atau bercorak aktif artinya orang tegas menerima dan

bahkan aktif mengajak orang lain untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan hasil dari program yang dilancarkan karena berhasilnya program dirasakan masyarakat sebagai keberhasilan masyarakat sendiri.

Masyarakat dapat berperanserta pada empat jenjang, yakni:

a. Peran serta dalam proses pembuatan keputusan

Setiap proses penyelenggaraan , terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena “putusan politik” yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan (Irene, Siti 2011:61)

b. Peran serta dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama di atas. Dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga tenaga, uang, barang metarial, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Menurut Ndraha(2983) dan Cohen dan Hoff (1979) dalam Irene (2011: 62) ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program yaitu: pertama menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program.

c. Peran serta dalam pemanfaatan hasil

Setiap usaha bersama manusia pembangunan, minsalnya bagaimana pun ditunjukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakatnya.oleh sebab itu, anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam mengikuti setiap usaha bersama yang ada. Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, rakyat Daerah harus pula meningmati hasilnya secara adil

d. Peran serta dalam evaluasi.

Sudah umum disepakati bahwa setiap penyelenggaraan apa pun dalam kehidupan bersama, hanya dapat dinilai berhasil apa bila dapat member manfaat bagi masyarakat. Sekalipun partsipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah merupakan unsur esensial yang melekat dalam penyelenggaraan itu sendiri, tapi tidak berarti setiap orang dapat berpartisipasi dengan intensitas dan kapasitas yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimaksud. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kepentingan, dan keahlian antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan bahwa dalam berpartisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bias terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya, minsal

keahliannya, kepentingannya ataupun tingkat kemampuannya (Kaho, Riwu, Josef 1988: 114-116).

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh dan partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan (Irene, Siti 2011:62)

Menurut Irene Siti (2011: 59) dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting yaitu:

- a. Dimensi pertama adalah siapa yang berpartisipasi
- b. Dan dimensi kedua adalah bagaimana berlangsungnya partisipasi.

Untuk itu Cohen dan Uphof (dalam Irene, Siti 2011: 59) mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung jawab, yaitu :

- a. Penduduk setempat
- b. Pemimpin masyarakat
- c. Pegawai pemerintah
- d. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu.

Partisipasi sendiri merupakan syarat mutlak dari demokrasi. Agar dapat terlaksananya partisipasi yang diharapkan, maka terlebih dahulu ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya kesadaran politik yang cukup tinggi bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat.
- b. Terciptanya suatu tradisi partisipasi dalam setiap proses pembangunan

- c. Tersedianya ruang serta jaminan bagi pelaksanaan dan pengembangan partisipasi itu sendiri(Widarta. 2003: 124)

Menurut Irena Siti (2011:64) tangga partisipasi meliputi:

- a. Citizen Pwer

Pada tahap ini terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Tingkatan meliputi control masyarakat, pelimpahan, dan kemitraan.

- b. Tokenism

Pada tahap ini hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan.

- c. Non participation

Pada tahap ini masyarakat hanya dijadikan objek. Menurut Nimmo Dan (2000: 127) gaya partisipasi yaitu

- a. Gaya partisipasi langsung yaitu gaya yang dilibatkan langsung dengan berhubungan yang dilakukan terus menerus dengan figur politik, menelpon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor pemerintahan.
- b. Gaya partisipasi kentra/ tak kentra yaitu gaya seperti ditunjukan jika seseorang mengutarakan opini hal itu bias meningkatkan kemungkinan diperoleh keuntungan material.
- c. Gaya partisipasi individu/ kolektif. Gaya ini sepert memberikan suara dan mengirim surat kepada pejabat.
- d. Gaya partisipasi terbuka/ sembunyi. Orang yang mengungkapkan opini politik terang-terangan dan tanpa ragu-ragu.

Macam tipologi partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelkasan proyek yanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- b. Partisipasi Informatif memiliki kararkteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akuarasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- c. Partisipasi konsultatif dengan karateristik masyaakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembutsn keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagi masukan) atau tindak lanjut
- d. Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan asyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
- e. Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.

- f. Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman prespektik dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematika. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
- g. Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan

2.2 Masyarakat

Menurut Elly M. Setiadi (2006:77) masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama

Menurut Ahmadi Abu (2003: 97) masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tantangan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

Masyarakat setempat merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta mereka lebih tertarik dengan tempat. (Elly M. Setiadi, 2006:80).

Fairchild dalam Elly M. Setiadi (2006:76) unsur atau ciri-ciri masyarakat terdiri dari yaitu:

- a. Kelompok manusia
- b. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama
- c. Adanya pertahanan dan kekekalan diri
- d. Adnya kesinambungan
- e. Adanya hubungan yang pelik diantara anggotanya

Karakteristik dari masyarakat itu adalah adanya sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan.

Menurut Ahmadi Abu (2003:97) dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu:

- a. Masyarakat sederhana

Dalam lingkungan masyarakat sederhana (primitif) pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, nampaknya berpangkal tolak dari latar belakang adanya kelemahan dan kemauan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan alam yang buas pada saat itu.

b. Masyarakat maju

Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial, atau lebih akrab dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai organisasi kemasyarakatan itu dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan terbatas pada cangkup nasional, regional maupun internasional.

2.3 Teori Administrasi Kependudukan dalam UU No.23 Tahun 2006

Menurut Sondang P. Sidiyasa bagian administrasi dalam Inu Kencana (2003: 5) administrasi adalah keseluruhan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hadari Namawi dalam Inu Kencana (2003:5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Atmosudirdjo Prajudi (1989: 28) Administrasi sebenarnya mempunyai banyak arti, yaitu:

- a. Administrasi merupakan system pemimpin dari pada suatu organisasi bidang urusan atau usaha, merupakan fungsi utama dari pada administrator. Intinya adalah management.
- b. Administrasi merupakan sistem informasi untuk mengendalikan suatu situasi, keadaan, atau organisasi. Inti dari pada administrasi sebagai sistem informasi pengendali keadaan adalah tata usaha.

- c. Administrasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih secara tertentu untuk menyelenggarakan tercapainya suatu tujuan bersama yang tertentu pula. Intinya adalah decisions Making.

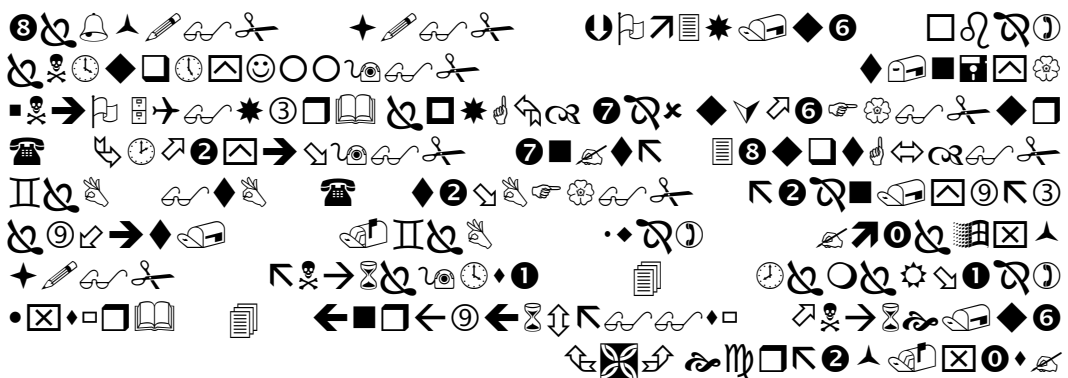
Menurut Inu Kencana (2003: 6) secara etimologi, adminstrasi berasal dari kata ad dan ministrate yang berarti sebagai berikut: melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilguna, mengelola, melaksanakan, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengasuhkan, dan mendayagunakan.

Dalam bahasa Arab disebutjuga sebagai yudabbiru, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan perkataan adminster. Dari kata ini terbentuk kata benda yaitu adminstrtio dan kata sifat administrativus yang dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai adminstrtion.

Menurut Inu Kencana (2003: 6) walaupun Alquraan secara khusus tidak menyebutkan istilah adminstrasi, namun digunakan kata dalam bahasa Arab yudabbiru yang artinya mengarahkan, melaksanakan, mengelola, menjalankan.

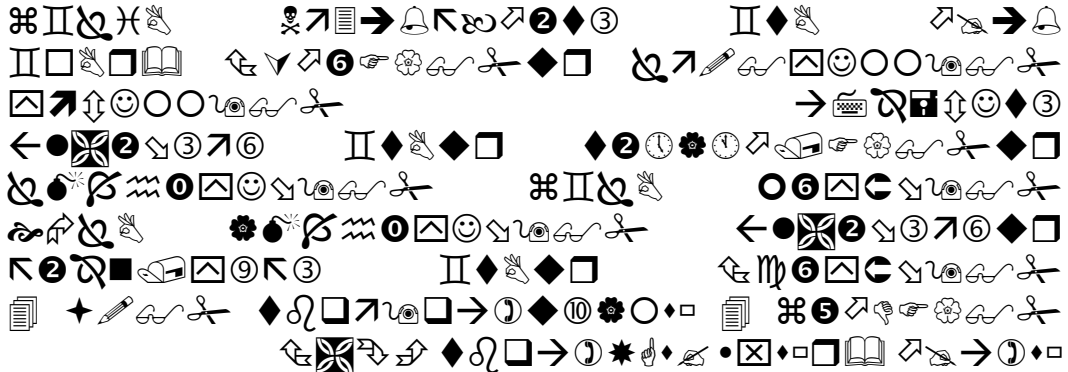
Kata yudabbiru muncul dalam Alquraan pada empat ayat, yaitu:

- a. Surah Yunus(10) ayat 3 dan31



Artinya : *Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang*

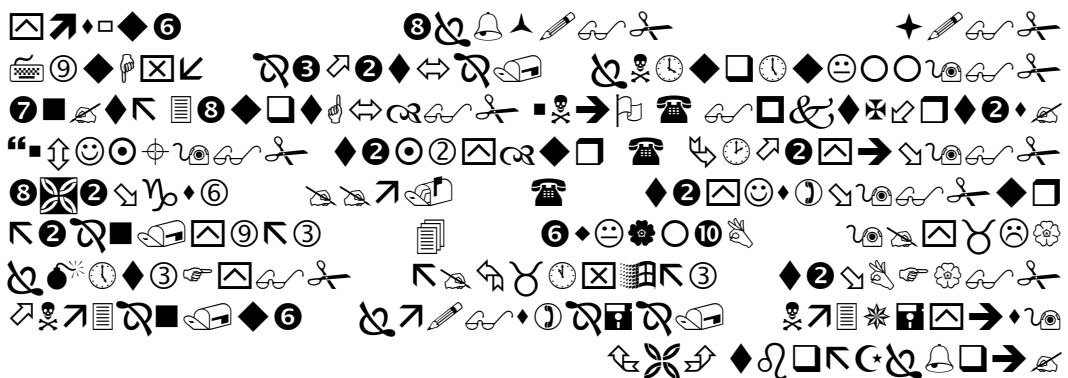
demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?



Artinya : Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?"

Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur dari ayam. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah

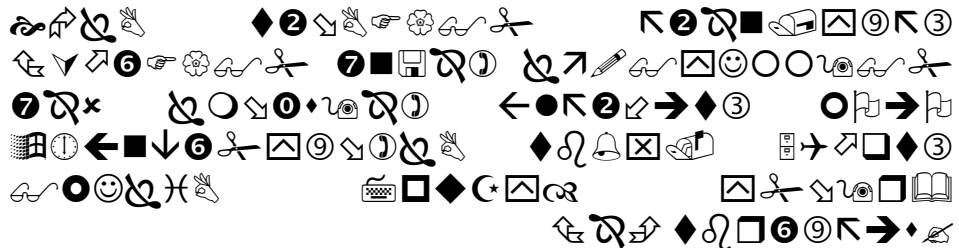
b. Surah Ar-Ra'd(13) ayat 2



Artinya : Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, Kemudian dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya),

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu

c. Surah As Sajadah (32) ayat 5



Artinya : *Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.*

Dalam terjemahan ketiga ayat ayat al-Quran ini didalam nya terdapat kata **mengatur**. Sedangkan dalam pengertian Administrasi adalah mengatur, Mengelola. Jadi dalam Al'Quran Allah Telah mengatur semua apa yang ada dibumi ini.

Secara terminologi administrasi menurut Ali Faried (2011: 19) adalah mengurus mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran an.

Keteraturan mengarah pada kondisi yang diharapkan dalam kegiatan administrasi, baik dalam suasana maupun didalam perkembangannya. Adapun tentang “pengaturan” mengarah pada pemahaman tentang administrasi, tidak saja dari sisi manajemen, juga lebih diarahkan kepada keperluan melakukan pengaturan dalam lokos pemerintahan yaitu “pemerintah dan pemerintahan” menurut Ali Faried (2011:20).

Administrasi menurut teori substansi adalah keteraturan. Pertanyaan filosof yang bias muncul secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut:

- a. Apa, mengapa, dan bagaimana keteraturan sebagai esensi administrasi.

Secara filosofis setiap pertanyaan memerlukan jawaban secara konsisten yang artinya setiap pertanyaan harus dijawab sesuai hakikat bentuk pertanyaan.

- b. Apa dan mengapa keteraturan menjadi esensi administrasi.

Manusia dalam kerja sama demikian itu tentunya menghendaki adanya saling memberi dan saling menerima, saling berkerja yang dirumuskan dalam saling ketergantungan, saling keterkaitan sehingga tercipta adanya hubungan yang teratur yang diikat oleh saling ketergantungan dan keterkaitan karena tuntutan esensi ekstensinya.

Secara filosofis dapat dirumuskan bahwa esensi administrasi adalah keteraturan. Maka keteraturan yang diharapkan adalah pengaturan yang melahirkan ketertiban.

- c. Bagaimana keteraturan menjadi esensi administrasi

Keteraturan yang menjadi esensi administrasi dapat dijelaskan mulai dari abstraksi melintasi konkretisasi hingga pada esensi ilmu administrasi dalam kerangka yang dapat diuraikan sebagai berikut,

1. Keteraturan dalam administrasi

Keteraturan merupakan perwujudan perilaku manusia yang menghendaki agar kehidupan dan segala aspek terjangnya selalu teratur

2. Keteraturan dalam organisasi dan manajemen

Organisasi sebagai konkretisasi dari abstraksi administrasi atau dalam bahasa lain sebagai perwujudan dari administrasi seyoginya dipahami dalam konteks parsial dalam ketunggalan, wujud conscience collective, manifestasi solidaritas mekanik dan organic, bukan bersifat mekanistik matematis, dan bukan pula bersifat isolasi absolut.

3. Keteraturan dalam human relations harus ditemukan

Humans relation sebagai perwujudan organisasi dan manajemen dalam aktivitas aktivitas yang diselenggarakan pada intinya mempersoalkan manusia yang saling berhubungan atau saling menghubungi dan dihubungi.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Nomor induk kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 yaitu setiap penduduk wajib memiliki NIK, NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis ansuran, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Kartu keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Dalam pasal 61 ayat 5 bahwa KK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masa berlaku KTP pada pasal 64 UU No.23 tahun 2006 yaitu:

- a. Untuk warga Negara Indonesia berlaku selama 5 tahun

- b. Untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkat secara akurat, lengkap, mutakhir, mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.
- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2.4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Mengenai E-KTP

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada 11 April 2013 mengenai Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader ditembuskan kepada:

- 1. Para Menteri/Kepala LPNK/Kepala Lembaga lainnya;
- 2. Kepala Kepolisian RI;
- 3. Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank;

4. Para Gubernur;
5. Para Bupati/Walikota.

Bahwa Sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelebihan yang mendasar dari e-KTP adalah bahwa didalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan;
2. Chip yang tersimpan didalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan card reader (alat pembaca chip);
3. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk card reader sebagaimana diamanatkan Pasal IOC ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan agar e-KTP yang sudah dimiliki oleh Renduduk (masyarakat), dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan hormat kami ingatkan kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk :

1. Memfasilitasi semua unit kerja/badan usaha atau nama lain di jajaran masing-masing yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menyediakan card reader dalam waktu yang singkat, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan anggaran dan proses pengadaannya merupakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga/Badan Usaha atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi;
 - c. Agar card reader tersebut dapat digunakan untuk membaca chip e-KTP secara efektif, maka dalam persiapan pengadaannya, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis dikoordinasikan dengan Tim Teknis Pemanfaatan e-KTP, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
2. Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, maka diminta kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank

Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan di foto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat “Nomor Induk Kependudukan (NIK)” dan “Nama Lengkap”

3. Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP. (Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI

<http://kabarwashliyah.com/2013/05/07/warga-washliyah-kaget-mendagri-larang-fotocopy-e-ktp/>).

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Menyusun data administratif merupakan suatu hal yang dapat dilakukan telah ditunjukkan melalui perkembangan metodologi yang telah secara luas diterapkan dan diharapkan akan mempermudah pemasangan bank data. Salah satu metode itu disebut “capture-and-record technique” (teknik tangkap-dan-rekam), yang mulai dipakai dalam administrasi Negara pada tahun 1930-an. (Dimock E.Marshall. 1996:125).

Proses pembuatan E- KTP (Secara Umum)

- b. Ambil nomor antrean
- c. Tunggu pemanggilan nomor antrean
- d. Menuju ke loket yang ditentukan
- e. Entry data dan foto
- f. Pembuatan KTP selesai(www.e-ktp.com)

Syarat pengurusan :

- a. Berusia 17 tahun atau lebih.
- b. Menunjukkan surat pengantar.
- c. Mengisi formulir F.1.
- d. Foto Kopi KK.

Proses pembuatan E-KTP.

- a. Penduduk datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan.
- b. Pemohon mengambil no antrean.
- c. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean.
- d. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan.
- e. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database.
- f. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung.
- g. Pemohon membubuhkan tandatangan pada alat perekam tandatangan.
- h. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan scan retina mata.
- i. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto,tanda tangan dan sidik jari.

j. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu

hasil.(<http://birokrasi.kompasiana.com/2011/11/22/tata-cara-pembuatan-e-ktp/>)

Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)

Nomor induk kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap penduduk wajib memiliki NIK. NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap penduduk hanya diberikan 1(satu) NIK yang berlaku seumur hidup (Kansil, Christine, 2001: 307).

2.5 Defenisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai suatu Volume. Dalam hal ini untuk memberi batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini:

- a. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapain tujuan itu.

- b. Partisipasi masyarakat adalah masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan, dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.
- c. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tantangan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.
- d. E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

2.6 Konsep Operasional

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2003: 38).

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu adalah partisipasi masyarakat. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut, adalah:

- a. Tingkat Pendidikan
- b. Tingkat pendapatan

- c. Jarak tempat tinggal
- d. Sikap
- e. Penyuluhan yang diberikan

2.7 Teknik Pengukuran

Agar teknik penelitian lebih baik dan jumlah sreta diakui kebenarannya maka perlu digunakan suatu pengukuran agar tidak terjadi kesalahan nantinya dilapangan. dalam teknik pengukuran ini penulis mencoba mengukur melalui variabel yang ada dalam konsep operasional.

a. Pendidikan

1. Sangat Baik, apabila pendidikan masyarakat tamatan S-2
2. Baik, apabila pendidikan masyarakat tamatan S-1
3. Cukup Baik, apabila masyarakat tamatan SMA
4. Kurang Baik, apabila masyarakat tamatan SMP
5. Tidak Baik, apabila masyarakat tamatan SD

b. Penadapatan

1. Sangat Baik, apabila semua masyarakat wajib KTP mengikuti Perekaman Data E-KTP
2. Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 2561 orang wajib KTP atau 79%.
3. Cukup Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 1872 orang wajib KTP atau 58%.
4. Kurang Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 1264 orang wajib KTP atau 39%.

5. Tidak Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 972 orang wajib KTP atau 30%.

c. Jarak Tempat Tinggal

1. Sangat Baik, apabila semua masyarakat wajib KTP mengikuti Perekaman Data E-KTP
2. Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 2561 orang wajib KTP atau 79%.
3. Cukup Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 1872 orang wajib KTP atau 58%.
4. Kurang Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 1264 orang wajib KTP atau 39%.
5. Tidak Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 972 orang wajib KTP atau 30%.

d. Sikap

1. Sangat Baik, apabila semua masyarakat wajib KTP mengikuti Perekaman Data E-KTP
2. Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 2561 orang wajib KTP atau 79%.
3. Cukup Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 1872 orang wajib KTP atau 58%.
4. Kurang Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 1264 orang wajib KTP atau 39%.

5. Tidak Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 972 orang wajib KTP atau 30%.

e. Penyuluhan

1. Sangat Baik, apabila semua masyarakat wajib KTP mengikuti Perekaman Data E-KTP

2. Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 2561 orang wajib KTP atau 79%.

3. Cukup Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 1872 orang wajib KTP atau 58%.

4. Kurang Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 1264 orang wajib KTP atau 39%.

5. Tidak Baik, apabila masyarakat mengikuti Perekaman data E-KTP mencapai 972 orang wajib KTP atau 30%

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Waktu penelitian Pada Bulan Mei 2012 sampai Bulan Agustus 2012.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara rinci sesuai dengan kenyataan yang ditemui dilapangan, serta dilengkapi dengan tabel yang nantinya diberikan penjelasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk non angka, seperti kalimat-kalimat, foto, atau rekaman suara dan gambar(Irawan, Prasetya.2004: 86)

b. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung berdasarkan Kuesioner dan Interview/ Wawancara. Data kuesioner diperoleh berdasarkan angket-angket yang berisi pertanyaan tertulis tentang partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP, angket ini diberikan

kepada masyarakat Desa Teratak Buluh berdasarkan Jumlah Sampel dalam penelitian. Dan data interview diperoleh berdasarkan Tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada nara sumber yaitu satu orang sekretaris Desa dan tiga orang operator E-KTP di Kecamatan Siak Hulu.

2. Data Skunder

Yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya dan data yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumen dokumen yang berupa data yang diolah dari objek penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai:

- a. Interview/ wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas. Dengan penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan kepada satu orang sekretaris desa dan tiga orang operator E-KTP kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Quisioner/ angket yaitu mengajukan daftar pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden (dalam hal ini para masyarakat Desa Teratak Buluh yang terpilih sebagai sampel) yang mana dalam penelitian ini penulis memberikan quisioner pada masyarakat yang terpilih sebagai sampel sebanyak 97 orang wajib KTP.

3.5 Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2003: 93). Populasi penelitian ini yaitu masyarakat wajib KTP berjumlah 3242 orang .

b. Sampel Penelitian

Menurut sugiyono (2003: 91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel dari populasi harus betul-betul mewakili. Bila populasi besar maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Untuk ukuran sampel dari populasi penulis menggunakan teori slovin, jumlah sampel diketahui sebanyak 97 jiwa wajib KTP.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

dimana

n = ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir

$$n = \frac{3242}{1 + 3242(10\%)^2}$$

$$n = \frac{3242}{1 + 3242(0,01)}$$

$$n = \frac{3242}{33,42}$$

$$= 97,00$$

= 97 jiwa masyarakat wajib KTP.

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel

No	Sub populasi (Orang)	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)
1	Masyarakat Wajib KTP	3242	97
	Jumlah	3242	97

Jadi jumlah sampel dari penelitian adalah 97 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak.

Sedangkan Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan Operator Pembuatan E-KTP di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara rinci sesuai dengan kenyataan yang ditemui dilapangan, serta dilengkapi dengan tabel yang nantinya diberikan penjelasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Adapun menurut Arikunto dalam menganalisa data penulis menuangkan dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan persentase dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total jumlah

Dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan pengelompokan menjadi 5 kriteria yaitu : Sangat baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik sebagai berikut :

- a. Sangat Baik = 80-100%
- b. Baik = 60-79%
- c. Cukup Baik = 40-59%
- d. Kurang Baik = 30-39%
- e. Tidak Baik = < 30%

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Teratak Buluh

Dalam rangka usaha peningkatan pelayanan pemerintahan terhadap Masyarakat baik dibidang pemerintahan, maupun pembangunan pada tingkat terendah, maka dibentuklah sebuah Organisasi tata kerja pemerintahan dibawah pemerintahan kecamatan yang bertanggung jawab menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui camat. Berdasarkan perda kabupaten kampar No.11 Tahun 2003 pasal 5 pemerintahan Desa mempunyai tugas membina masyarakat. Desa dikepalai oleh seorang kepala yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Desa Teratak Buluh adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bila dilihat dari letaknya sangat strategis karena berada pada jalan lintas dan pinggiran sungai Kampar jarak ke Ibu Kota propinsi 14 Km, ke Ibu Kota Kabupaten 65 Km, dan ke Ibu Kota Kecamatan 25 Km. Berdasarkan data didapat di lapangan Desa Teratak Buluh salah satu Kenegerian lama yang terbentuk di bawah naungan Kerajaan Pagaruyung dengan batin pertama bernama Maruhun Nan Sakti keturunan Cindur Mato, dengan wilayah kekuasaan :

Utara : Berbatas dengan batin senapelan di rimba perpaten (Purna MTQ)

Timur : Berbatas dengan ketemenggungan buluh cina.

Selatan : Berbatas dengan Durian Paku Raja di Teratak Air Hitam (Situung)

Barat : Berbatas dengan batin tambang di telukjering.

Pada era kolonialis Belanda Teratak Buluh di perintah oleh Tengku Kocik (Adik Maruhun Nan Sakti lain Ibu). Kolonial Belanda memberlakukan "Pajak Jiwa", yang tidak dapat diterimanya hingga Tengku Kocik beserta, Teng Ku Nung, Tengku Ujang beserta Datuk Sinaro (Solim), Datuk Marajo (Rahman), Datuk Juanso (Tengku Nayan), dan Datuk Gadang mencari perlindungan ke Kerajaan Siak Sri Indra Pura.

Perkembangan penduduk dan pembangunan hingga terlaksana kegiatan beberapa kali pemekaran desa, Desa Pantai Raja, Desa Lubuk Siam, Desa Kampung Pinang dan terakhir tahun 2003 pemekaran Dusun 3 menjadi Desa Kubang Jaya. Desa Teratak Buluh kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar salah satu desa tepian Sungai Kampar sepanjang 5.6 km dengan ketebalan lebih kurang 1,5 km hingga termasuk salah satu desa yang terkena bencana alam banjir, pada musim penghujan umumnya perkampungan kondisinya becek dikarenakan belum adanya drainase. Pemanfaatan sungai kampar sebagai MCK masih 60 % dari penduduk desa, padahal baku mutu air Kampar kian tercemar, namun tradisi turun menurun sebagian besar masih belaku.

Batasan Wilayah

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kubang jaya Kecamatan Siak Hulu.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampungpinang Kecamatan Perhentian Raja.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuksiam Kecamatan Siak Hulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Telukenidai kecamatan Tambang.

Berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa tahun 2012, Desa Teratak Buluh terdiri atas 34 Dusun dengan jumlah kepala keluarga 1.413 KK yang terdiri atas 1375 laki – laki dan 38 perempuan. Dan jumlah masyarakat Desa Teratak Buluh adalah 4372 orang sedangkan yang wajib KTP berjumlah 3242 orang, yang hanya memiliki KTP di Tahun 2012 hanya 973 orang.

4.2 Sosial Budaya Masyarakat Desa Teratak Buluh

Layaknya tradisi perkampungan lama yakni berumah ditepian sungai awalnya sebagai penghubung antar penduduk mempergunakan sampan. Setelah adanya sarana jalan maka pemukiman penduduk dibangun ditepian jalan.

Desa Teratak Buluh masih mempertahankan adat yakni berasal dari Minangkabau dan hingga kini :

1. Datuk Gadang : Persukuan Caniago.
2. Datuk Marajo : Persukuan Melayu Tua.
3. Datuk Sinaro : Persukuan Melayu Muda.
4. Datuk Juanso : Persukuan Piliang

Desa Teratak Buluh termasuk desa yang agamis, dengan tempat ibadah yang diri atas 4 Masjid dan 10 Musholla, adapun kegiatan sosial antara lain yaitu gotong royong, musyawah yang dilakukan di kantor desa atau dimasjid.

Penduduk menurut etnis masyarakat Desa Teratak Buluh terdiri atas berbagai macam etnis yaitu Aceh, Batak, Nias, Melayu, Minang, Sunda, Jawa, ambon, mayoritas masyarakat Desa Teratak Buluh berasal dari etnis Melayu.

4.3 Jumlah Masyarakat Desa Teratak Buluh Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data penduduk tahun 2012, bahwa jumlah masyarakat Desa Teratak Buluh wajib KTP yaitu 3242 jiwa yang terdiri atas 1.892 jiwa laki – laki dan 1.350 jiwa perempuan dan terdapat 1.413 kepala keluarga (KK). Lebih jelas lagi dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1892	58,35%
2	Perempuan	1350	41,64%
	Jumlah	3242	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2012

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah masyarakat Desa Teratak Buluh yang wajib KTP yang terdiri atas laki – laki berjumlah 1892 orang atau 58% perempuan berjumlah 1350 orang atau 42%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak adalah laki –laki yang berjumlah 1892 orang atau 58 %.

4.4 Jumlah Masyarakat Desa Teratak Buluh Berdasarkan Tingkat Umur

Masyarakat Desa Teratak Buluh menurut golongan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu :

Tabel IV.2: Jumlah Masyarakat Desa Teratak Buluh Berdasarkan Umur

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
3	17-27 Tahun	345	244	589	18,17
4	28-38 Tahun	365	286	651	20,08
5	39-49 Tahun	404	207	611	18,85
6	50-60 Tahun	304	295	599	18,48
7	61-71 Tahun	387	245	632	19,45
8	71 Tahun Keatas	87	73	160	4,94
	Jumlah	1892	1350	3242	100

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teratak Buluh Tahun 2012

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Teratak buluh dari jenis kelamin Laki-Laki adalah 1892, sedangkan dari jenis kelamin perempuan adalah 1350 orang. Selanjutnya dilihat dari kelompok usia 28-38 merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jumlah 651 orang atau 20,08% dan jumlah paling sedikit adalah kelompok usia 71 Tahun keatas dengan jumlah 160 orang atau 4,94% dari jumlah penduduk Desa Teratak Buluh Wajib KTP.

4.5 Mata pencarian

Berdasarkan data penduduk tahun 2012. Mata pencarian merupakan hal sangat terpenting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari untuk mencari nafkah dengan kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Demikian juga dengan masyarakat Teratak Buluh yang mempunyai beragam mata pencarian sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini yaitu.

Tabel IV.3 : Mata Pencarian Penduduk Desa Teratak Buluh

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	704
2	PNS	161
3	Pedagang	301
4	Wiraswasta	302
5	Peternak	303
6	karyawan pabrik	225
7	Buruh	676
8	Kesehatan	250
9	Nelayan	320

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teratak Buluh 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Teratak Buluh memiliki banyak propesi dan mayoritas masyarakatnya sebagai petani dengan sejumlah 704 orang dan juga masyarakatnya berprofesi buruh seperti buruh pasir sungai, buruh kayu balak, dan buruh dipasar dengan jumlah 676 orang.

4.6 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal sangat penting karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pola pikir seseorang sehingga dapat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel IV. 4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tertak Buluh

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE(%)
1	Tidak Sekolah	306	9,44
2	Tamatan SD	587	18,11
3	Tidak Tamat SD	453	13,97
4	Tamatan SLTP	339	10,46
5	Tidak Tamat SLTP	209	6,45
6	Tamatan SMA	579	17,86
7	Tidak Tamat SMA	412	12,71
8	Sedang S1	300	9,25
9	Tamatan S1	38	1,17
10	Tamatan Diploma III	17	0,52
11	Sedang S2	2	0,06
	JUMLAH	3242	100

Sumber Data: Kantor kepala Desa 2012

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Teratak Buluh yang paling besar adalah tamatan SD sebanyak 587 orang atau 18,11%, dan yang paling sedikit yaitu sedang S2 sebanyak 2 orang atau dengan persentase 0,06%.

Walupun masyarakat desa Teratak Buluh mayoritas tamatan SD tidak menutup kemungkinan untuk ikut berpartisipasi jika tidak bisa dalam bentuk pemikiran, ide-ide, namun bisa menyumbangkan dalam bentuk tenaga.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di Desa Teratak Buluh Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.5 : Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Tertak Buluh

No	Mata Pencarian	Penghasilan Per Bulan (Rp)
1	Petani	Rp. 1,5-4 Juta
2	PNS	Rp.2,5-5 Juta
3	Pedagang	Rp. 1,5-4 Juta
4	Wiraswasta	Rp. 1,5-5 Juta
5	Peternak	Rp.1 - 5-Juta
6	karyawan pabrik	Rp. 1,5-3 Juta
7	Buruh	Rp.500Ribu
8	Kesehatan	Rp. 1-2 Juta
9	Nelayan	Rp. 1-5 Juta

Suber Data: Kantor Kepala Desa 2012

Dilihat dari tabel diatas penghasilan masyarakat Desa Teratak Buluh yang mempunyai penghasilan paling tinggi adalah petani karet dan petani sawit dengan penghasilan(Rp. 1,5- 5 juta) per bulan dan yang paling rendah adalah buruh pasir sungai dan buruh pasar dengan penghasilan (Rp500ribu) per bulan. Dengan keadaan pendapatan yang demikian dapat kita lihat bahwa tingkat pendapatan untuk ukuran suatu desa sudah baik.

4.7 Agama Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Teratak Buluh adalah Suku Melayu Ocu, ada beberapa suku nias batak dan suku melayu ocu ini yang sangat kuat memeluk agama islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.6 : Agama Penduduk

No.	Agama	Jumlah(orang)	Persentase(%)
1	Islam	3235	99,78
2	Kristen	7	0,22
	Jumlah	3242	100

Sumber Data: Kantor Kepala Desa 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Teratak Buluh beragama Islam dengan berjumlah 3235 orang atau 99,78%, dan beragama islam berjumlah 7 orang atau 0,22%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Teratak Buluh adalah beragama Islam.

4.8 Pemerintahan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembanaguanan. Menurut peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 11 Tahun 2003 pasal 6 (1) kepala Desa berkedudukan sebagai:

- a. Pimpinan organisasi pemerintahan Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraab urusan Pemerintahan Desa.
- b. Pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerja sama dengan pimpinan masyarakat lainnya.
- c. Pendamai perselisihan di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi dan Misi Kantor Kepala Desa Teratak Buluh

Visi kantor kepala Desa Teratak Buluh

“Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Terbaik Dan Efisien”

Misi Kantor Kepala Desa Teratak Buluh

a.Melaksanakan pelayanan yang transparan, efektif, cepat dan murah

b.Pelayanan yang bersifat mempermudah tanpa membedakan status

Nama- Nama Kepala Desa Teratak Buluh

Desa Teratak Buluh dari Tahun 1979 sampai Tahun 2013 ini terdapat 6 kali pergantian Kepala Desa, yang mana kepala Desa Pertama Yaitu Bapak Hasan E nani, beliau menjabat menjadi Kepala Desa dari Tahun 1979 samapai 1984, Setelah Periode pertama selesai maka pada tahun 1984 terpilihlah bapak Darmansyah menjadi kepala Desa Kedua yaitu dari tahun 1984 samapai 1994, Keapa desa Yang ketiga yaitu Bapak Bachtiar Thalib beliau menjabat pada tahun 1994 sampai 2004, Kepala Desa keempat yaitu bapak Darman pada tahun 2004 sampai 2009, kepala Desa yang kelima dan keenam yaitu bapak Yuniwir beliau menjabat 2 kali priode Kepala Desa dari tahun 2009 sampai 2014.

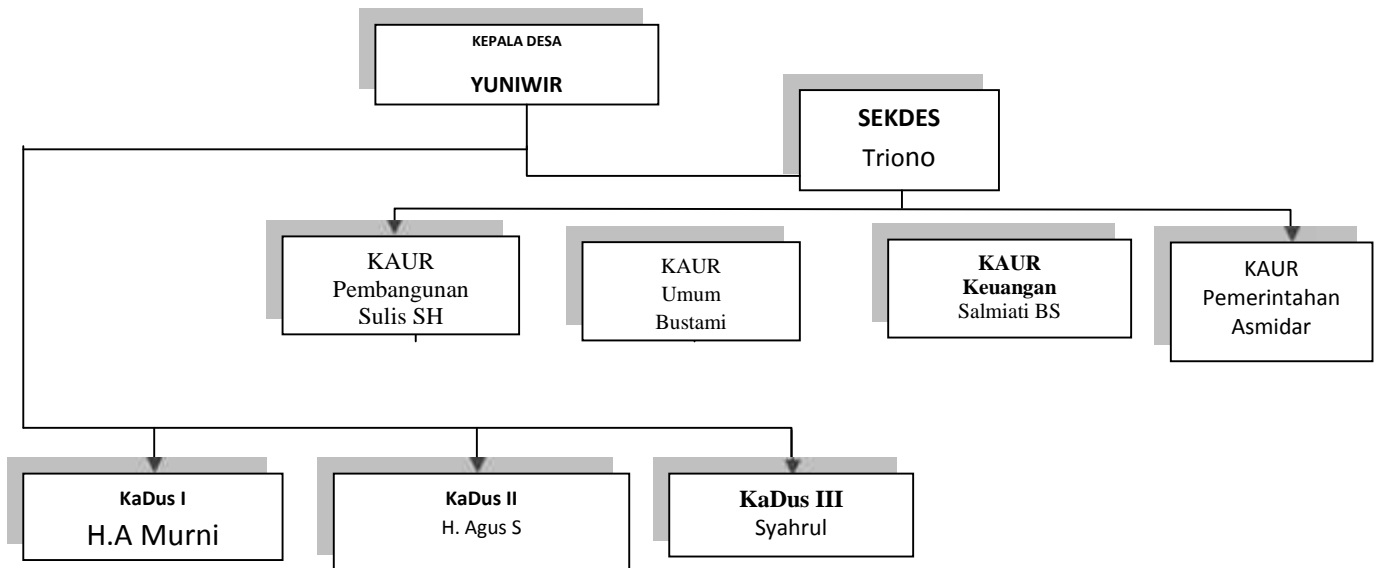
Tabel IV.7 : Nama-Nama Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Tahun Masa Jabatan
1	Hasan E Nani	1979-1984
2	Darmansyah	1984 -1989
3	Bachtiar Thalib	1989 – 1994
4	Darman	1994 – 2004
5	Yuniwir	2004 – 2009
6	Yuniwir	2009 –2014

Sumber Data: kantor Kepala Desa 2012

Susunan Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 11 Tahun 2003 pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercatum dalam lampiran peraturan daerah ini. Dapat dilihat pada struktur sebagai berikut:



Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 5 (1) pemerintah Desa mempunyai tugas:

- a. Membina kehidupan masyarakat
- b. Membina perekonomian Desa
- c. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
- d. Mengajukan Rancangan peraturan Desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa bersama BPD

Kemudian pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembina masyarakat Desa
- b. Pelaksanaan pembina perekonomian Desa
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat Desa
- e. Perumusan dan pengajuan Rancangan peraturan Desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa bersama BPD.

b. Sekretaris Desa

Menurut pasal 7 (1) Sekretaris Desa berkependudukan sebagai staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Memberi saran dan pendapat kepada kepala Desa
- b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan sekretaris Desa.
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan keadaan Desa.
- d. Merumuskan program kegiatan kepala Desa
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
- g. Menyusun Rancangan penerimaan dan belanja Desa

- h. Mengadakan inventarisasi kekayaan Desa
- i. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat Desa

c. Kepala Urusan

Menurut peraturan Daerah pasal 8 (1) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Sekretaris Desa. Dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala Urusan pemerintahan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan Administrasi penduduk di Desa
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk(KTP)
- c. Melaksanakan Administrasi pertanahan
- d. Melaksanakan pencatatan monografi Desa
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentaraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (HANSIP)
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- g. Melakukan kegiatan lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

Kepala Urusan Pembangunan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan Desa
- b. Melaksanakan pencatatan hasil Swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa

- c. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan.
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/ daftar usaha kegiatan serta mencatat daftar isian proyek/ daftar isian kegiatan

Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai

tugas:

- a. Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
- b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya.
- c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- d. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
- e. Mencatat investasi kekayaan Desa

Kepala Urusan Keuangan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai

tugas:

- a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru untuk dikembangkan
- c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa
- d. Melakukan administrasi keuangan Desa

BAB V
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Identitas Responden Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan angket yang disebarakan maupun wawancara langsung dapat diklasifikasikan mengenai keberadaan responden yang menjadi nara sumber dalam penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak hulu kabupaten Kampar.

5.1.1 Identitas Responden Berdasrkan Tingkat Umur

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

NO	USIA	JUMLAH	PERSENTASE
1	17- 20 Tahun	37	38.14%
2	20 - 55 Tahun	43	44.33%
3	56 keatas	17	17.53%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Dari Lapangan Desa Teratak Buluh

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden berumur 20 – 55 tahun yaitu sebanyak 43 Orang (44,33 %) masih aktif fisik dan daya ingat masih kuat. Sedangkan yang berumur lansia atau 56 keatas sebanyak 17 Orang (17,53 %) fisik dan daya ingatnya sudah lemah ini disebabkan pengaruh umur.

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap berpartisipasi sesorang terhadap kegitan-kegiatan kemasyarakatan yang ada yaitu usia responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian yaitu Orang yang wajib KTP.

dari tingkat umur yaitu 17-20 tahun, 21 – 55 tahun dan 56 tahun keatas. Masyarakat dari kelompok usia menengah ke atas yaitu yang berusia dari 21-55 tahun responden ini adalah yang cenderung lebih banyak yang berpartisipasi, karna pada usia ini mereka lebih produktif lebih semangat untuk beraktifitas lebih dari pada masyarakat yang dari kelompok usia 56 tahun keatas. Masyarakat pada usia ini lebih fakum atau kurang berinisiatif untuk berpartisipasi karena daya ingat yang mulai lemah dan tenaga yang menurun dan usia antara 17-20 tahun mereka juga kurang dalam berpartisipasi sebab mayoritas mereka masih sibuk belajar dan fikirannya kurang berkreaitif dalam partisipasi. Jadi pada usia ini dapat dikatakan partisipasi dalam pembuatan e-KTP kurang epektif.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Laki-Laki	63	64.95%
2	Prempuan	34	35.05%
	Jumlah	97	100.00%

Sumber Data: Dari Lapangan Desa Teratak Buluh

Berdasarkan identitas responden menurut jenis kelamin diatas dapat diketahui jenis kelamin dalam penelitian ini untuk laki-laki berjumlah 63 orang (64.95%) dan perempuan berjumlah 34 (35.05%).

Jadi dari jumlah responden berdasarkan jenis kelamin lebih banyak jenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Dengan banyaknya jenis kelamin laki-laki merupakan gerak aktif dalam berpartisipasi dalam pembuatan E-KTP. Karena jenis kelamin laki-laki adalah perwakilan dari rumah tangga masing-masing keluarga. Responden paling sedikit yaitu jenis kelamin perempuan. Walaupun

jenis kelamin perempuan sedikit dalam pengambilan responden namun bisa juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan E-KTP ke kantor Camat.

5.1. 3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMALAH	PERSENTASE
1	SD	33	34.02%
2	SMP	18	18.56%
3	SMA/ Sederajat	36	37.11%
4	Akademik/ serajana	10	10.31%
	Jumlah	97	100.00%

Sumber Data: Dari Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari data diatas terlihat pendidikan yang diraih oleh responden bervariasi yang paling banyak adalah tingkat sekolah menengah atas yakni 36 Orang atau (37,11%). SD sebanyak 33 Orang atau (34,02%), selanjutnya SMP yaitu 18 Orang atau (18,56%) dan S1 sebanyak 10 Orang atau (10,31%). Dari berbagai tingkat pendidikan masyarakat bukan berarti mengurangi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam salah program pemerintah dalam pembuatan E-KTP.

5.1. 4. Identitas Responden Berdasarkan pekerjaan

Tabel V.4 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persebtase
1	wira usaha	20	20,61%
2	Petani	21	21.65%
3	buruh pasir	30	30.93%
4	Nelayan	26	26.80%
	Jumlah	97	100.00%

Sumber Data: Dari Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari data diatas terlihat pekerjaan responden bervariasi yang paling banyak adalah Buruh Pasir 30 orang atau 30,93% dan nelayan sebanyak 26 orang atau 26,80%, selanjutnya wirausaha sebanyak 20 orang atau 20,61% dan petani 21

orang atau 21,65%. Dari berbagai jenis pekerjaan tentu berbeda beda penghasilan. Dari tabel diatas terlihat yang paling dominan adalah buruh pasir dan nelayan. Dari jenis pekerjaan ini akan mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk datang ke kantor camat dalam perekaman data. Untuk nelayan kerjanya dari subuh sampai siang dan begitu juga untuk buruh pasir kerjanya dari subuh sampai siang.

5.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-Ktp Di Desa Teratak Buluh

Menurut Panggabean dalam Muhamad Al Amin (2003: 15) mengatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

5.2.1 Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat..

Faktor pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap kegiatan masyarakatan yang ada. Untuk mengetahui tanggapan respondent tentang kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-Ktp di Desa Teratak Buluh. Dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	57	58.76%
2	Setuju	25	25.77%
3	tidak setuju	9	9.28%
4	sangat tidak setuju	6	6.19%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-ktip mengatakan setuju sebanyak 57 Orang atau 58,76 kemudian yang mengatakan sangat setuju sebanyak 25 Orang atau 25,77%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 9 orang atau 9,28%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 6 orang atau 6,19%. alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setujudengan jumlah57 Orang atau 58,76%.jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada sekretaris desa bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP karena menurut beliau tingkat pendidikan ini menentukan pola pikir pada individu masing-masing. Jika pendidikan mereka diatas SMP atau SMA maka mereka cenderung berfikir bahwa pembuatan e-ktip ini sangat diharuskan bagi setiap orang wajib KTP yang mana dalam undang-undang sudah ditegaskan bahwa setiap masyarakat diatas umur 17 keatas wajib memiliki identitas atau yang dikenal KTP dan sekarang akan berganti dengan KTP elektronik. Jika masyarakat nya berpendidikan SD atau tidak sekolah maka pemikiran mereka akan cenderung

tidak peduli akan kepemilikan suatu identitas. Jadi kesimpulannya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam pembuatan E-KTP.

(wawancara : Sekretaris Desa, 12 Desember 2012)

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Mengenai Faktor Pendidikan Mempengaruhi Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Mengikuti Prosedur Pembuatan E-KTP

KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
sangat setuju	52	53.61%
Setuju	27	27.84%
tidak setuju	12	12.37%
sangat tidak setuju	6	6.19%
J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai faktor pendidikan mempengaruhi sikap masyarakat dalam mengikuti prosedur pembuatan e-ktp mengatakan sangat setuju sebanyak 52 Orang atau 53,61%, kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 27 Orang atau 27,84%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 12 orang atau 12,37%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 6 orang atau 6,19%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 52 Orang atau 53,61%.

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Mengenai Setiap Warga yang Wajib KTP Harus Memiliki E-Ktp Sebagai Identitas Diri

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	49	50.52%
2	Setuju	20	20.62%
3	tidak setuju	12	12.37%
4	sangat tidak setuju	16	16.49%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai setiap warga wajib KTP harus memiliki e-ktip sebagai identitas diri mengatakan sangat setuju sebanyak 49 Orang atau 50,52%, kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 20 Orang atau 20,62%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 12 orang atau 12,37 %, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 16 orang atau 16,49%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 49 orang atau 50,52%

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Mengenai Bahwa Pengetahuan Tentang E-KTP Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	51	52.58%
2	Setuju	32	32.99%
3	tidak setuju	9	9.28%
4	sangat tidak setuju	5	5.15%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai bahwa pengetahuan tentang E-KTP mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP. mengatakan sangat setuju sebanyak 19 Orang atau 19,59%, kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 38 Orang atau 39,18%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 15 orang atau 15,46%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 25 orang atau 25,77%. Jadi dapat disimpulkan alternatif jawaban yang paling banyak adalah setuju dengan jumlah 38 Orang atau 39,18%.

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Buta Huruf dan Tidak Bias Baca Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	55	56.70%
2	Setuju	19	19.59%
3	tidak setuju	12	12.37%
4	sangat tidak setuju	11	11.34%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai masyarakat buta huruf dan tidak bisa baca mempengaruhi partisipasi masyarakat. mengatakan sangat setuju sebanyak 55 Orang atau 56,70%kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 19 Orang atau 19,59%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 12 orang atau 12,37%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 orang atau 11,34%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 55 Orang atau 56,70%.

5.2.2 Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja, usaha, dan sebagainya atau pencarian(Sugono, dendy dkk.2003: 69). Di dalam status sosial, peran uang atau harta sangat dominan, keterjangkauan dapat dipengaruhi oleh bentuk fasilitas sebagai pendukung yang penting didalam gerak sehari hari. Suatu penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomiannya.

Tabel V.10 :Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pendapatan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	54	55.67%
2	Setuju	23	23.71%
3	tidak setuju	9	9.28%
4	sangat tidak setuju	11	11.34%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tingkat pendapatan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP. mengatakan sangat setuju sebanyak 54 Orang atau 55,67% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 23 Orang atau 23,71% yang mengatakan tidak setuju sebanyak 9 orang atau 9,28%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 orang atau 11,34%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 54 Orang atau 55,67%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada sekretaris Desa bahwa tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk datang ke kantor camat dalam pembuatan E-KTP, beliau mengatakan bahwa masyarakat yang ada di Desa Teratak Buluh bermacam mata Pencarian ada yang bertani nelayan atau wirswasta, tidak semua penduduk Desa teratak buluh berkehidupan kecukupan, bagi yang tidak mampu untuk ke kantor camat dikarenakan biaya transportasi maka mereka tidak akan bias ke kantor camat kecamatan siak hulu karena jarak antara kantor camat ke Desa teratak Buluh cukup jauh memakan waktu 30 menit. Ini juga menyebabkan tingkat pendapatan

pada suatu masyarakat dalam pembuatan E-KTP. (wawancara : Sekretaris Desa, 12 Desember 2012).

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Mengenai Jenis Pekerjaan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	41	42.27%
2	Setuju	25	25.77%
3	tidak setuju	17	17.53%
4	sangat tidak setuju	14	14.43%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai jenis pekerjaan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP. mengatakan sangat setuju sebanyak 41 Orang atau 42,27% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 25 Orang atau 25,77% yang mengatakan tidak setuju sebanyak 17 orang atau 17,53% dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 14 orang atau 14,43 Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 41 Orang atau 42,27%.

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Harus Meninggalkan Pekerjaan untuk Berpartisipasi Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	54	55.67%
2	Setuju	20	20.62%
3	tidak setuju	10	10.31%
4	sangat tidak setuju	13	13.40%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden masyarakat harus meninggalkan pekerjaan untuk berpartisipasi dalam pembuatan e- ktp mengatakan sangat setuju sebanyak 54 Orang atau 55,67% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 20 Orang atau 20,62% yang mengatakan tidak setuju sebanyak 10 orang atau 10,31%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 13 orang atau 13,40%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat tidak setujudengan jumlah 54 Orang atau 55,67%

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Mengenai Jika Meninggalkan Pekerjaan Maka Tidak Dapat Uang untuk Makan

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	45	46.39%
2	Setuju	34	35.05%
3	tidak setuju	11	11.34%
4	sangat tidak setuju	7	7.22%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai jika meninggalkan pekerjaan maka tidak dapat uang untuk makan. mengatakan sangat setuju sebanyak 45 Orang atau 46,39%kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 34 Orang atau 35,05% yang mengatakan tidak setuju sebanyak 11 orang atau 11,34%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 7 orang atau 7,22%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 45 Orang atau 46,39%.

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Pengangguran Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	57	58.76%
2	Setuju	23	23.71%
3	tidak setuju	10	10.31%
4	sangat tidak setuju	7	7.22%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai masyarakat pengangguran mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP. mengatakan sangat setuju sebanyak 57 Orang atau 58,76% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 23 Orang atau 23,71%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 10 orang atau 10,31%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 7 orang atau 7,22%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat tidak setuju dengan jumlah 57 Orang atau 58,76%.

5.2.3 Jarak Tempat Tinggal

Jika antara tempat yang akan dituju dengan tempat dimana seseorang bertempat tinggal, relatif dapat menentukan minat dan motivasi seseorang untuk mencapainya. Semakin dekat tempat tujuan dari tempat tinggalnya, semakin gampang dan mudah untuk dicapai atau dijangkau dan akan semakin tidak merepotkan.

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Mengenai Jarak Tempat Tinggal dengan Kantor Camat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	54	55.67%
2	Setuju	19	19.59%
3	tidak setuju	10	10.31%
4	sangat tidak setuju	14	14.43%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai jarak tempat tinggal dengan kantor camat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP mengatakan sangat setuju sebanyak 54 Orang atau 55,67% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 19 Orang atau 19,59%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 10 orang atau 10,31%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 14 orang atau 14,43%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 54 Orang atau 55,67%

Tabel V.16 : Tanggapan Responden Mengenai Kekantor Camat Harus Menggunakan Transportasi Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	54	55.67%
2	Setuju	43	44.33%
3	tidak setuju	0	0.00%
4	sangat tidak setuju	0	0.00%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai kekantor camat harus menggunakan transportasi dalam pembuatan E-

KTP mengatakan sangat setuju sebanyak 54 Orang atau 55,67% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 43 Orang atau 44,33%, yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 54 Orang atau 55,67%.

Tabel V.17 : Tanggapan Responden Mengenai Jarak Tempat Tinggal Dapat Mempengaruhi Minat Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	46	47.42%
2	Setuju	31	31.96%
3	tidak setuju	8	8.25%
4	sangat tidak setuju	12	12.37%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai jarak tempat tinggal dapat mempengaruhi minat dalam pembuatan E-KTP mengatakan sangat setuju sebanyak 46 orang atau 47,42% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 31 Orang atau 31,96%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 8 orang atau 8,25%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 12 orang atau 12,37%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 46 Orang atau 47,42%.

Tabel V.18 : Tanggapan Responden Mengenai Jika Tidak Punya Kendaraan Tidak Bisa Kekantor Camat Dalam Perekaman Data Untuk E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	56	57.73%
2	Setuju	20	20.62%
3	tidak setuju	12	12.37%
4	sangat tidak setuju	9	9.28%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai jika tidak punya kendaraan tidak bisa ke kantor camat dalam perekaman data untuk E-KTP. mengatakan sangat setuju sebanyak 56 Orang atau 57,73% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 20 Orang atau 20,62%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 12 orang atau 12,37%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 9 orang atau 9,28%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju dengan jumlah 56 Orang atau 57,73%.

Tabel V.19 : Tanggapan Responden Mengenai Warga yang Asli Daerah yang Berada Diluar Daerah Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	21	21.65%
2	Setuju	23	23.71%
3	tidak setuju	28	28.87%
4	sangat tidak setuju	25	25.77%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai warga yang asli daerah yang berada diluar daerah mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-ktp. mengatakan sangat setuju sebanyak 21 Orang atau 21,65% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 23 Orang atau 23,71%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 28 orang atau 28,87%, dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 25 orang atau 25,77%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah tidak setuju dengan jumlah 28 Orang atau 28,87%.

5.2.4 Sikap

Sikap merupakan perilaku. “perilaku” ialah tingkat atau perbuatan yang berkaitan dengan tanggapan seseorang terhadap lingkungannya (Sugono, denny dkk.2003: 354).

Tabel V.20 : Tanggapan Responden Mengenai Perubahan KTP Menjadi E-KTP Merupakan Hal Yang Efektif

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	28	28.87%
2	Setuju	19	19.59%
3	tidak setuju	31	31.96%
4	sangat tidak setuju	19	19.59%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai perubahan KTP menjadi E-KTP merupakan hal yang efektif. mengatakan sangat setuju sebanyak 28 Orang atau 28, 87% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 19 Orang atau 19,59%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 31 orang atau 31,96% dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 19 orang atau 19,59%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah tidak setuju dengan jumlah 31 Orang atau 31,96%

Tabel V.21 : Tanggapan Responden Mengenai Apa Masyarakat Setuju Bahwa KTP Lama Diganti Dengan E-KTP

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	15	15.46%
2	Setuju	32	32.99%
3	tidak setuju	43	44.33%
4	sangat tidak setuju	7	7.22%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai apakah masyarakat setuju bahwa KTP lama diganti Dengan E-KTP. mengatakan sangat setuju sebanyak 15 Orang atau 15,46% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 32 Orang atau 32,99%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 43 orang atau 44,33% dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 7 orang atau 7,22 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah tidak setuju dengan jumlah 43 Orang atau 44,33%.

Tabel V.22 : Tanggapan Responden Mengenai Dalam Pembuatan E-KTP Dapat Mempermudah Urusan

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	21	21.65%
2	Setuju	18	18.56%
3	tidak setuju	38	39.18%
4	sangat tidak setuju	20	20.62%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai dalam pembuatan E-KTP dapat mempermudah urusan. mengatakan sangat setuju sebanyak 21 Orang atau 21,65% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 18 Orang atau 18,56 %, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 38 orang atau 39,18% dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 20 orang atau 20,62 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah tidak setuju berjumlah 38 Orang atau 39,18%

Tabel V.23: Tanggapan Responden Mengenai Dalam Pembuatan E-KTP Ini Sangat Mengganggu Aktifitas Dalam Pekerjaan Sehari-Hari

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	24	24.74%
2	Setuju	38	39.18%
3	tidak setuju	17	17.53%
4	sangat tidak setuju	18	18.56%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai dalam pembuatan E-KTP ini dapat mengganggu aktifitas dalam pekerjaan sehari-hari. mengatakan sangat setuju sebanyak 24 Orang atau 24,74% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 38 Orang atau 39,18%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 17 orang atau 17,53% dan yang mengatakan sangat tidak setuju sebanyak 18 orang atau 18,56 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah setuju berjumlah 38 Orang atau 39,18%.

Tabel V.24 :Tanggapan Responden Mengenai Dalam Pembuatan E-KTP Tidak Bisa Diwakilkan

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	47	48.45%
2	Setuju	50	51.55%
3	tidak setuju	0	0.00%
4	sangat tidak setuju	0	0.00%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai dalam pembuatan E-KTP ini tidak dapat diwakilkan. mengatakan sangat setuju sebanyak 27 Orang atau 48,45% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 50

Orang atau 51,55 %, yang mengatakan tidak setujuan sangat tidak setuju tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah setuju berjumlah 50 Orang atau 51,55%.

5.2.5 Penyuluhan yang Diberikan

Penyuluhan adalah memberikan penerangan. Memberikan penerangan dalam hal ini berupa usaha untuk memberikan penjelasan dan kejelasan dari seseorang pribadi atau kelompok terhadap masyarakat umum.

Tabel V.25: Tanggapan Responden Mengenai Dalam Pembuatan E-KTP Pemerintahan Desa Harus Mensosialisasikan Program Ini Kepada Masyarakat

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	57	58.76%
2	Setuju	40	41.24%
3	tidak setuju	0	0.00%
4	sangat tidak setuju	0	0.00%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai dalam pembuatan E-KTP pemerintahan desa harus mensosialisasikan program ini kepada masyarakat. mengatakan sangat setuju sebanyak 57 Orang atau 58,76% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 40 Orang atau 41,24 %, yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju berjumlah 57 Orang atau 58,76%.

Tabel V.26: Tanggapan Responden Mengenai Dalam Mensosialisasikan Pemerintah Desa Sudah Dapat Dimengerti

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	15	15.46%
2	Setuju	27	27.84%
3	tidak setuju	35	36.08%
4	sangat tidak setuju	20	20.62%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai dalam pembuatan E-KTP sosialisasi pemerintahan desa sudah dapat dimengerti . mengatakan sangat setuju sebanyak 15 Orang atau 15,46% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 27 Orang atau 27,84 %, yang mengatakan tidak setuju 35 orang atau 36,08% dan sangat tidak setuju 20 orang atau 20,62%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah tidak setuju berjumlah 35 orang atau 36,08%.

Dari tabel diatas bahwa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Desa Teratak Buluh tidak bisa di mengerti masyarkat sepenuhnya. Ini mengakibat kan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP.

Tabel V.27: Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi yang Diberikan Membuat Masyarakat Termotivasi

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	21	21.65%
2	Setuju	18	18.56%
3	tidak setuju	31	31.96%
4	sangat tidak setuju	27	27.84%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai sosialisasi yang diberikan membuat masyarakat termotivasi dalam pembuatan E-KTP . mengatakan sangat setuju sebanyak 21 Orang atau 21,65% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 18 Orang atau 18,56 %, yang mengatakan tidak setuju 31 orang atau 31,96% dan sangat tidak setuju 27 orang atau 27,84%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah tidak setuju berjumlah 31 orang atau 31,96%.

Tabel V.28: Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Pemerintahan Desa yang Diberikan Sudah Keseluruh Masyarakat Desa Teratak Buluh

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	sangat setuju	24	24.74%
2	Setuju	38	39.18%
3	tidak setuju	17	17.53%
4	sangat tidak setuju	18	18.56%
	J U M L A H	97	100.00%

Sumber Data: Lapangan Desa Teratak Buluh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai sosialisasi pemerintahan desa yang diberikan sudah keseluruh masyarakat desa teratak buluh. mengatakan sangat setuju sebanyak 24 Orang atau 24,74% kemudian yang mengatakan setuju sebanyak 38 Orang atau 39,18%, yang mengatakan tidak setuju 17 orang atau 17,53% dan sangat tidak setuju 18 orang atau 18,56%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah setuju berjumlah 38 Orang atau 39,18%.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada sekretaris desa tentang penyuluhan, menurut beliau pemerintahan Desa sudah berusaha

menginformasikan kepada Masyarakat Desa Teratak Buluh bahwa ada perekaman Data E-KTP di kantor Camat Kecamatan Siak Hulu dengan cara diumumkan di mesjid dan melalui pada setiap RT/RT agar diumumkan kepada setiap RT untuk perekaman Data. Dan pemerintahan Desa juga menginformasikan pada saat wirid desa bahwa untuk segera melakukan perekaman data ke kantor Camat Siak Hulu kabupaten Kampar. (wawancara : Sekretaris Desa, 12 Desember 2012)

Pemerintahan Desa juga telah menginformasikan kepada masyarakat Desa Teratak Buluh tentang syarat-syarat untuk perekaman data yaitu sebagai berikut :

Syarat pengurusan :

1. Berusia 17 tahun atau lebih atau telah kawin.
2. Menunjukkan surat pengantar dari Kepala Desa.
3. Mengisi formulir F.1.
4. Foto Kopi KK.
5. Asli KTP Lama

(wawancara : Sekretaris Desa, 12 Desember 2012)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada operator pembuatan E-KTP dikantor camat bahwa beliau menguraikan proses dalam pembuatan sebagai berikut :

Proses pembuatan E-KTP :

1. Penduduk datang ketempat pelayanan dengan membawa surat panggilan dan persyaratan di atas.
2. Pemohon mengambil no antrian.
3. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrian.

4. Pemohon menuju ke loket yang telah ditentukan.
5. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dan database.
6. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung.
7. Pemohon membubuhkan tandatangan pada alat perekam tandatangan.
8. Petugas merekam sidik jari dan scan retina mata.
9. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari.
10. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil.

Catatan :

1. Tidak boleh diwakilkan.
2. Jika nomor antrian telah dipanggil tetapi yang bersangkutan tidak ditempat, maka akan dipanggil pada akhir nomor antrian sesuai dengan urutan nomor antrian atau mengganti nomor antri baru dengan menyerahkan nomor yang lama.

Operator ini merupakan pegawai dari dinas catatan sipil kabupaten kampar, beliau mengatakan bahwa, mereka sebelum di sebarakan pada setiap kecamatan di kabupaten kampar terlebih dahulu mereka mengikuti pelatihan untuk E-KTP. Operator ini bukan dari pegawai camat tersebut.(wawancara : Operator E-KTP, 28 April 2012)

5.3 Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Indikator Penelitian

Secara keseluruhan, rekapitulasi dan analisis hasil penelitian terhadap masing – masing sub variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.3.1 Tingkat Pendidikan

Tabel V.29: Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Pendidikan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh

No	Indikator	Tanggapan Responden				JUMLAH
		ST	S	TS	STS	
1	Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di desa teratak buluh	57	25	9	6	97
2	pendidikan mempengaruhi terhadap sikap masyarakat dalam mengikuti prosedur pembuatan E-KTP	52	27	12	6	97
3	setiap warga harus memiliki E-KTP sebagai identitas Diri	49	20	12	16	97
4	Pengetahuan E-KTP mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP	51	32	9	5	97
5	buta huruf dan tidak bisa baca Mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam pembuatan pembuatan E-KTP	55	19	12	11	97
JUMLAH		264	123	54	44	485
%		54.43 %	25.36 %	11.13 %	9.07 %	100.00%

Sumber Data : Olahan Pelatihan 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa faktor pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh. Tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju totalnya 57 Orang atau 54,43%, kemudian yang menyatakan setuju totalnya adalah 123 atau 25,36%,

yang menyatakan tidak setuju totalnya adalah 54 atau 11,13%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju totalnya adalah 44 atau 9,07%.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari jawaban responden menyatakan bahwa faktor pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

5.3.2 Tingkat Pendapatan

Tabel V.30 : Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Pendapatan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh

No	Indikator	Tanggapan Responden				JUMLAH
		ss	s	TS	STS	
1	Tingkat pendapatan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP	54	23	9	11	97
2	Jenis pekerjaan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP	41	25	17	14	97
3	masyarakat harus meninggalkan pekerjaan untuk berpartisipasi dalam pembuatan E-KTP	54	20	10	13	97
4	Jika meninggalkan pekerjaan dalam sehari maka tidak dapat uang	45	34	11	7	97
5	Tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran mempengaruhi partisipasi	57	23	10	7	97
	JUMLAH	251	125	57	52	485
	%	51.75 %	25.77 %	11.75 %	10.72 %	100.00%

Sumber Data : Olahan Pelatihan 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa faktor pendapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh. Tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju totalnya 251 atau 51,75% kemudian yang menyatakan setuju totalnya adalah 125 atau 25,77%, yang

menyatakan tidak setuju totalnya adalah 57 atau 11,75%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju totalnya adalah 52 atau 10,72%.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari jawaban responden menyatakan bahwa faktor pendapatan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar

5.3.3 Jarak Tempat Tinggal

Tabel V.31: Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Jarak Tempat Tinggal Antara Desa Teratak Bulu dengan Kecamatan Siak Hulu

No	Indikator	Tanggapan Responden				
		SS	S	TS	STS	JUMLAH
1	Jarak tempat tinggal dengan kantor camat mempengaruhi partisipasi	54	19	10	14	97
2	untuk ke kantor camat harus menggunakan Transportasi	54	43	0	0	97
3	Jarak tempat tinggal dapat mempengaruhi minat dalam berpartisipasi	46	31	8	12	97
4	Jika tidak mempunyai kendaraan maka tidak bisa ke kantor camat dalam perekaman data	56	20	12	9	97
5	Warga asli yang berada di luar daerah mempengaruhi partisipasi masyarakat	56	9	20	12	97
	JUMLAH	266	122	50	47	485
	%	54.85%	25.15%	10.31%	9.69%	100.00%

Sumber Data : Olahan Pelatihan 2012

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa faktor antara jarak tempat tinggal dengan kantor Camat Kecamatan Siak Hulu mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh. Tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju totalnya 266 atau 54,85% kemudian yang menyatakan setuju totalnya adalah 122 atau 25,15% yang menyatakan tidak setuju totalnya adalah 50 atau 10,31, dan yang menyatakan sangat tidak setuju totalnya adalah 47 atau 9,69%.

5.3.4 Sikap

Tabel V.32: Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Sikap Masyarakat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pembuatan E-KTP

No	INDIKATOR	Tanggapan Responden				
		SS	S	TS	STS	JUMLAH
1	Pereubahan KTP menjadi E-KTP menjadi hal yang efektif	28	19	31	19	97
2	Apa bapak setuju perubahan KTP menjadi E-KTP merupakan hal yang efektif	15	32	43	7	97
3	Dalam pembuatan E-KTP dapat mempermudah urusan	21	18	38	20	97
4	Dalam pembuatan E-KTP ini sangat mengganggu aktifitas dalam pekerjaan sehari-hari	24	38	17	18	97
5	Dalam berpartisipasi dalam pembuatan E-KTP tidak bisa diwakilkan	47	50	0	0	97
	Jumlah	135	157	129	64	485
	%	27.84 %	32.37 %	26.60 %	13.20 %	100.00%

Sumber Data : Olahan Pelatihan 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa faktor Sikap mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh. Tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju totalnya 135 atau 27,84% kemudian yang menyatakan setuju totalnya adalah 157 atau 32,34%, yang menyatakan tidak setuju totalnya adalah 129 atau 26,60 %, dan yang menyatakan sangat tidak setuju totalnya adalah 64 atau 13,20%

5.3.5 Penyuluhan

Tabel V.33: Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Penyuluhan yang Diberikan Oleh Pemdes Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh

No	INDIKATOR	Tanggapan Responden				
		SS	S	TS	STS	JUMLAH
1	Dalam pembuatan E-KTP pemerintahan Desa harus mensosialisasikan program ini	57	40	0	0	97
2	Penjelasan dari pihak pemerintahan desa tentang E-KTP dapat dimengerti masyarakat	15	27	35	0	97
3	Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintahan desa membuat masyarakat desa termotivasi	21	18	31	27	97
4	Sosialisasi pemerintahan Desa sudah merata keseluruh masyarakat desa teratak buluh	24	38	17	18	97
	Jumlah	117	157	129	64	388
	%	30.15%	40.46%	33.25%	16.49%	100.00%

Sumber Data : Olahan Pelatihan 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa penyuluhan yang diberikan pemdes kepada masyarakat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh. Tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju totalnya 117 atau 30,15%, kemudian yang menyatakan setuju totalnya adalah 157 atau 40,46% yang menyatakan tidak setuju totalnya adalah 129 atau 33,25% dan yang menyatakan sangat tidak setuju totalnya adalah 64 atau 16,49%

Berdasarkan rekapitulasi tabel diatas dari 97 orang responden yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan E-KTP di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu dimana indikator-indikator tersebut yaitu dari segi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jarak tempat tinggal, sikap, dan

penyuluhan dapat mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan E-KTP dinyatakan sangat setuju untuk dapat dilihat pada rincian sebagai berikut ini :

1. Tanggapan responden mengenai faktor pendidikan mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan E-KTP menyatakan sangat setuju sebanyak 54,43 %
2. Tanggapan responden mengenai faktor pendapatan partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan E-KTP menyatakan sangat setuju sebanyak 51,75%
3. Tanggapan responden mengenai jarak tempat tinggal partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan E-KTP menyatakan sangat setuju sebanyak 54,85%
4. Tanggapan responden mengenai sikap mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan E-KTP menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 27,87%.
5. Tanggapan responden mengenai penyuluhan yang diberikan mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan E-KTP menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 30,15%

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil peneliti lakukan bahwa masyarakat Desa teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar, yang mana dari data Yang Telah Didapat Dan diolah Bahwa partisipasi masyarakat Desa Teratak Buluh Cukup Baik Yang mana persentase nya adalah 58% dari Masyarakat Wajib KTP. Dan ada beberapa faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Teratak Bulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi tingkat pendidikan

Bahwa tingkat pendidikan desa Teratak Buluh dominan berdasarkan penelitian adalah Tingkat SMA Sederajat sebanyak 36 Responden dari 97 responden dan di Tingkat SD sebanyak 33 orang dari 97 Responden dengan pendidikan seperti ini maka akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengikuti salah satu program pemerintah yaitu dalam pembuatan E-KTP. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan persentase 54,43%.

2. Dari segi pendapatan/ penghasilan/ pekerjaan

dari segi pekerjaan berdasarkan penelitian masyarakat Desa Teratak Buluh paling banyak adalah nelayan dan buruh pasir dengan jumlah 30 buruh pasir dan 26 orang nelayan. Dengan beragam jenis pekerjaan ini maka mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP. Berdasarkan jawaban responden bahwa pendapatan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP dengan persentase 51,75%.

3. Dari segi jarak tempat tinggal

Jarak tempat tinggal antara kecamatan dengan Desa Teratak Buluh menempuh jarak 25 km, jika tidak mempunyai kendaraan maka akan sulit untuk datang ke kantor camat karena transportasi umum juga tidak ada. Jarak juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan E-KTP dengan persentase dari jawaban responden adalah 54,85%.

4. Dari segi sikap

Dari segi sikap masyarakat merasa terganggu aktifitasnya dalam sehari-hari untuk perekaman data ini karena memerlukan waktu antrian yang sangat lama, berdasarkan jawaban responden sebanyak 27,87%

5. Penyuluhan yang diberikan

Dari penyuluhan yang diberikan oleh pemerintahan Desa ke masyarakat banyak belum bisa di mengerti karena pemerintahan Desa hanya mensosialisasi dengan cara pengumuman di mesjid secara global saja, tentang E-KTP sehingga masyarakat Desa Teratak Buluh kurang paham arti pentingnya perekaman Data E-KTP.

Kelima faktor ini adalah faktor masyarakat Desa Teratak Buluh enggan untuk berpartisipasi dalam pembuatan E-KTP, selain lima faktor ini masyarakat Desa Teratak Buluh kurang kesadaran akan kepemilikan identitas karena menurut mereka, mereka tidak perlu yang namanya KTP karena kami hanya berkecimpung di sungai tau pun di pasar. Jadi pandangan penulis akan hal ini yaitu kurang kesadaran masyarakat akan identitas diri sebagai warga Indonesia sedangkan dalam UU telah jelaskan bahwa setiap warga Indonesia wajib memiliki yang namanya Identitas diri yang mana menunjukkan identitas sebagai warga Indonesia.

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan sesuai dengan hasil penelitian ini untuk masyarakat Desa Teratak Buluh Sebagai Berikut :

a. Saran Untuk Pemerintah Desa:

1. Penulis menyarankan agar pemerintahan Desa dan semua aparatur Desa dapat mengajak masyarakat berkerjasama dan berpartisipasi dalam pembuatan E-KTP.
2. Penulis menyarankan bahwa sosialisasi tersebut harus dilaksanakan secara rutin pada saat perekaman data untuk E-KTP.
3. Seharusnya diturunkan pegawai dari dinas catatan sipil yang telah mengikuti pelatihan E-KTP agar bisa mensosialisasikan kesetiap Desa tentang E-KTP sehingga masyarakat bisa mengetahui apa itu E-KTP dan apa manfaatnya.

b. Saran Untuk Masyarakat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar yaitu :

1. Agar masyarakat Teratak Buluh lebih meningkatkan lagi Kesadarannya akan pentingnya dalam Pembuatan Kepemilikan Suatu Identitas.
2. Dengan cara masyarakat harus mengikuti perekaman data yang dilakukan dikantor Camat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, 2007, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu, 2003, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al Amin, Muhammad, 2003, *skripsi (partisipasi masyarakat dalam program bina desa hutan di desa langgam kecamatan langgam kabupaten pelelawan)*, pekanbaru: UNRI.
- Ali, Faried, 2011, *Teori dan konsep Administrasi*, Jakarta: PT Rajagrafindio Persada.
- Davis, Keith dan Jhon W. Nestrom, 1996. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Dimock, E Marshall, 1996. *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga
- Ishak, 2010. *posisi masyarakat dalam era otonomi daerah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ishaq, Isjoni. 2002. *Masalah Sosial Masyarakat*. Pekanbaru : Unri Press.
- Irawan, Prasetya, 2003, *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Irene, Astuti Dwiningrum Siti, 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kho, Josef Riwu, 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil, Christine, 2001. *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafira.
- Kencana, Inu, 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung: Bumi Aksara.
- Nimo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Pasaribu, I.L, dan Simanjuntak.B,. 1986. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : Tasrito.
- Panggabean, 1998, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Desa hutan*, Medan, USU.
- Setyoningtyas, Emilia, 2003. *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apolla..

- Suyanto, Bagong dan Sutinan, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta :2006. Kencana.
- Sumarto, 2003, *inovasi, partisipasi dan good governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sugiono, Dedy Dkk, 2003, *kamus bahasa Indonesia sekolah dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA.
- Suharmi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triputro, R. Widodo, 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD.
- Tandjung, Djamaludin, 1999. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Husaini dan Akbar, Setiady Purnomo, 1995. *Penghantar Statistik*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Widarta, I, 2003. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.

Non Buku :

<http://birokrasi.kompasiana.com/2011/11/22/tata-cara-pembuatan-e-ktp/>). www.e-ktp.com.

<http://kabarwashliyah.com/2013/05/07/warga-washliyah-kaget-mendagri-larang-fotocopy-e-ktp/>).

(<http://www.kamparkab.go.id/blog-berita/3529-bupati-hadiri-rakernas-e-ktp-2012-keberhasilan-e-ktp-di-kampar-mencapai-64-persen>)

Undang-Undang Administarsi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006

Lampiran :

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.